



**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
PADA UPT. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Diploma III Administrasi Keuangan  
Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh

**Desy Priyantini Izzaty**

**NIM 130803102009**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**



**ADMINISTRATION IMPLEMENTATION  
OF VEHICLES TAX AT UPT. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA  
TIMUR KABUPATEN BONDOWOSO**

**JOB SIMULATION REPORT**

submitted as one of condition to getexpert Degree of Madya

Diploma III Program of Finance Administration

Economic Faculty University of Jember

By

**Desy Priyantini Izzaty**

**NIM 130803102009**

**DIPLOMA III PROGRAM OF FINANCE ADMINISTRATION  
MAJOR OF MANAGEMENT  
ECONOMIC FACULTY  
UNIVERSITY OF JEMBER  
2016**

**JUDUL**  
**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
PADA UPT. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN BONDOWOSO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Desy Priyantini Izzaty  
NIM : 130803102009  
Program Studi : Administrasi Keuangan (D3)  
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal:

**25 Mei 2016**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua,

Sekretaris,

**Drs. Adi Prasodjo, MP**  
**NIP. 195505161987031001**

**Gusti Ayu Wulandari, SE, MM**  
**NIP. 198309122008122001**

Anggota,

**Drs. Markus Apriono, MM**  
**NIP. 196404041989021001**

Mengetahui/ Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan

**Dr. Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si.**  
**NIP 19630614 199002 1 001**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

NAMA : DESY PRIYANTINI IZZATY  
NIM : 130803102009  
FAKULTAS : EKONOMI  
PROGRAM STUDI : DIII ADMINISTRASI KEUANGAN  
JURUSAN : MANAJEMEN  
JUDUL LAPORAN : PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. DINAS  
PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN BONDOWOSO

---

Jember, 9 Mei 2016

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Administrasi Keuangan

Laporan Praktek Kerja Nyata  
Telah disetujui Oleh Dosen  
Pembimbing

Dra. Susanti P.,M.Si.

NIP. 196609181 199203 2 002

Dra. Susanti P.,M.Si.

NIP. 196609181 199203 2 002

## PERSEMBAHAN

Laporan praktek kerja nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Sriyani dan Ayahanda Ponco Susilo tercinta yang telah mengajarku tentang arti kehidupan, semangat hidup, memberiku kasih sayang dan pengorbanan sehingga saya bisa mengerti tentang arti kehidupan seperti sekarang dan bisa menyelesaikan studi ini.
2. Keluargaku terutama Adikku tercinta Rizal Wahyu Fajrianto yang paling aku sayangi dan kakakku Azhimatul Noor Bashari Diyanti serta Martin Taufik Hidayat, terima kasih untuk do'a dan motivasi yang telah kalian berikan.
3. Guru – guruku sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
4. Teman kos khususnya Novi, Dila, Nia, dan Cindy yang selalu memberiku semangat, dukungan dan setia menemaniku.
5. Mareta Utamy Kholidah dan Nurul Eka teman seperjuangan yang selalu memberiku semangat untuk mengenakan toga bersama.
6. Aswin Ageng Praditya yang selalu memberiku semangat dan dukungan.
7. Teman – temanku jurusan Administrasi Keuangan yang telah memberi support, kalian memberiku inspirasi
8. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang kubanggakan.

**MOTTO**

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.”

(Sayyidina Ali bin Abi Talib r.a.)

“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.”

(Khalifah Umar bin Khaththab r.a.)

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna.”

(Einstein)

## PRAKATA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, dengan memberikan rahmat serta hidayahNya, sehingga dengan waktu yang telah tersedia saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR KABUPATEN BONDOWOSO.”** Laporan ini merupakan salah satu syarat yang harus penulis penuhi untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Diploma III Administrasi Keuangan, Universitas Jember 2016.

Penyusun yakin bahwa penulisan laporan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fathorrozi, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Ibu Dra. Susanti P. M.Si., selaku Ketua Prodi DIII Administrasi Keuangan Fakultas Universitas Jember;
3. Dra. Susanti P. M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulisan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini;
4. Bapak dan Ibu Staff koleksi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan pusat yang telah memberikan bantuannya;
5. Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso dan Bapak Heru Kurnianto, SH Kasub. Bag Tata Usaha, terima kasih telah memberikan kesempatan melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
6. Seluruh Karyawan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso, terutama bagian Tata Usaha dan Penagihan Pak Heru, Mas Yus, Mas Ribut, Mas Bintang, Pak Arifin, yang telah memberikan bantuan, semangat dan dukungan dalam penyusunan laporan ini.
7. Kedua orang tua yang telah memberikan motivasi dan semangat.

8. Adikku Rizal Wahyu Fajrianto dan Kakakku Azhimatul Noor Bashari Diyanti serta Martin Taufik Hidayat yang selalu mendukung saya untuk menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.
9. Teman kosku khususnya Novi, Dila, Nia, dan Cindy terimakasih selalu setia menemani dan memberi semangat serta dukungan.
10. Mareta Utamy Kholidah dan Nurul Eka teman seperjuangan yang selalu memberiku semangat untuk mengenakan toga bersama.
11. Aswin Ageng Praditya yang selalu memberiku semangat dan dukungan.
12. Teman-teman yang selalu berbagi informasi dan memberikan bantuan dalam penyusunan penulisan ini.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan penulisan laporan ini.
14. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis Menyadari bahwa laporan Praktek Kerja Nyata ini jauh dari sempurna, baik menyangkut aspek penulisan maupun materi. Untuk itu tanggapan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Jember, Mei 2016

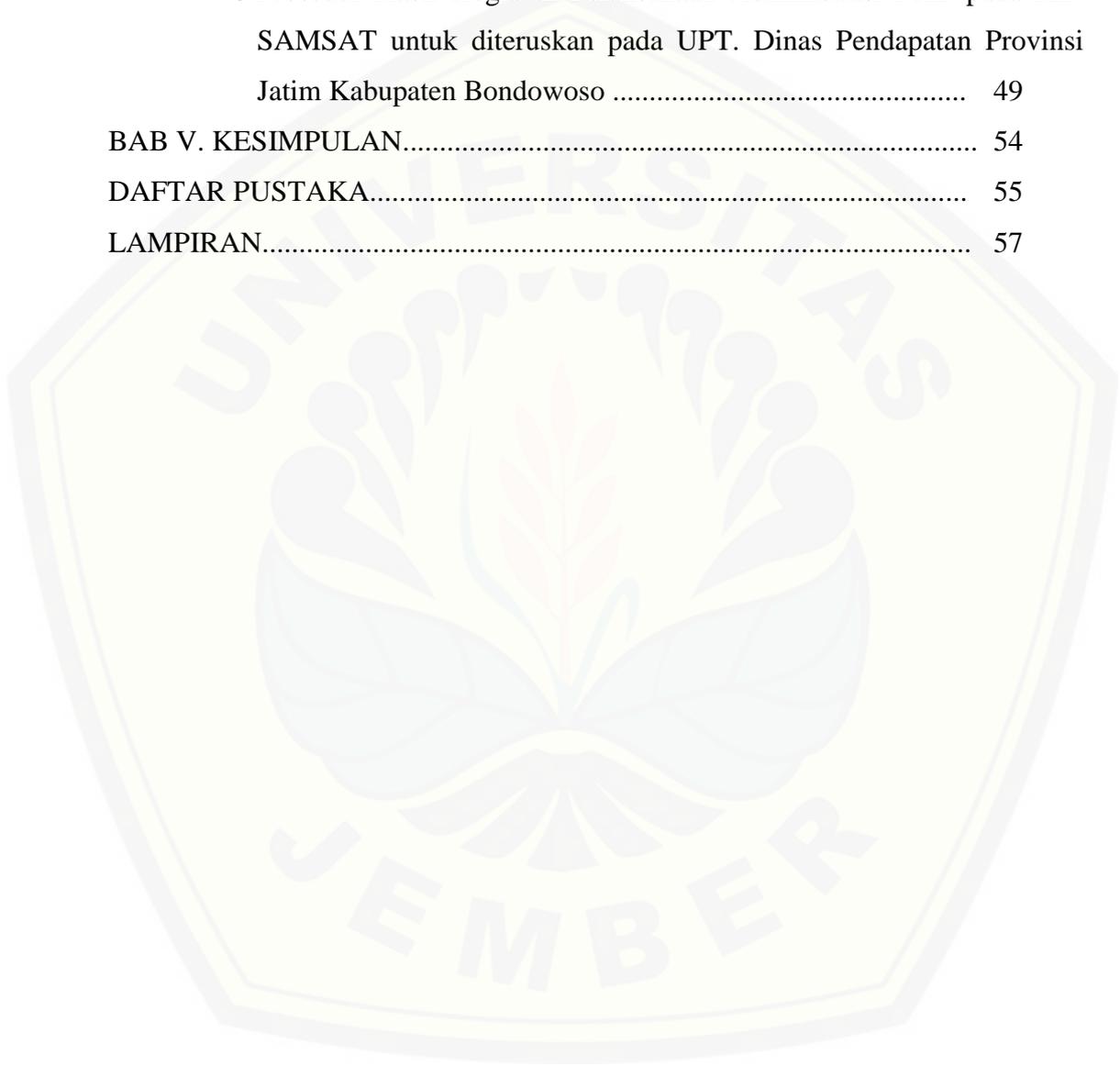
Penyusun

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN .....	4
1.2.1 Tujuan PKN .....	4
1.2.2 Kegunaan PKN .....	5
1.3 Obyek dan Jangka Waktu PKN .....	5
1.3.1 Obyek Kegiatan PKN .....	5
1.3.2 Jangka Waktu PKN.....	5
1.4 Jadwal Pelaksanaan PKN.....	5
1.5 Bidang Ilmu PKN .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Pengertian Administrasi.....	8
2.1.2 Fungsi Administrasi.....	10
2.1.3 Tujuan dan Ciri-ciri Administrasi.....	11
2.1.4 Manfaat Administrasi Dalam Perusahaan.....	11
2.2 Pajak .....	12
2.2.1 Pengertian Pajak .....	12
2.2.2 Fungsi Pajak .....	13

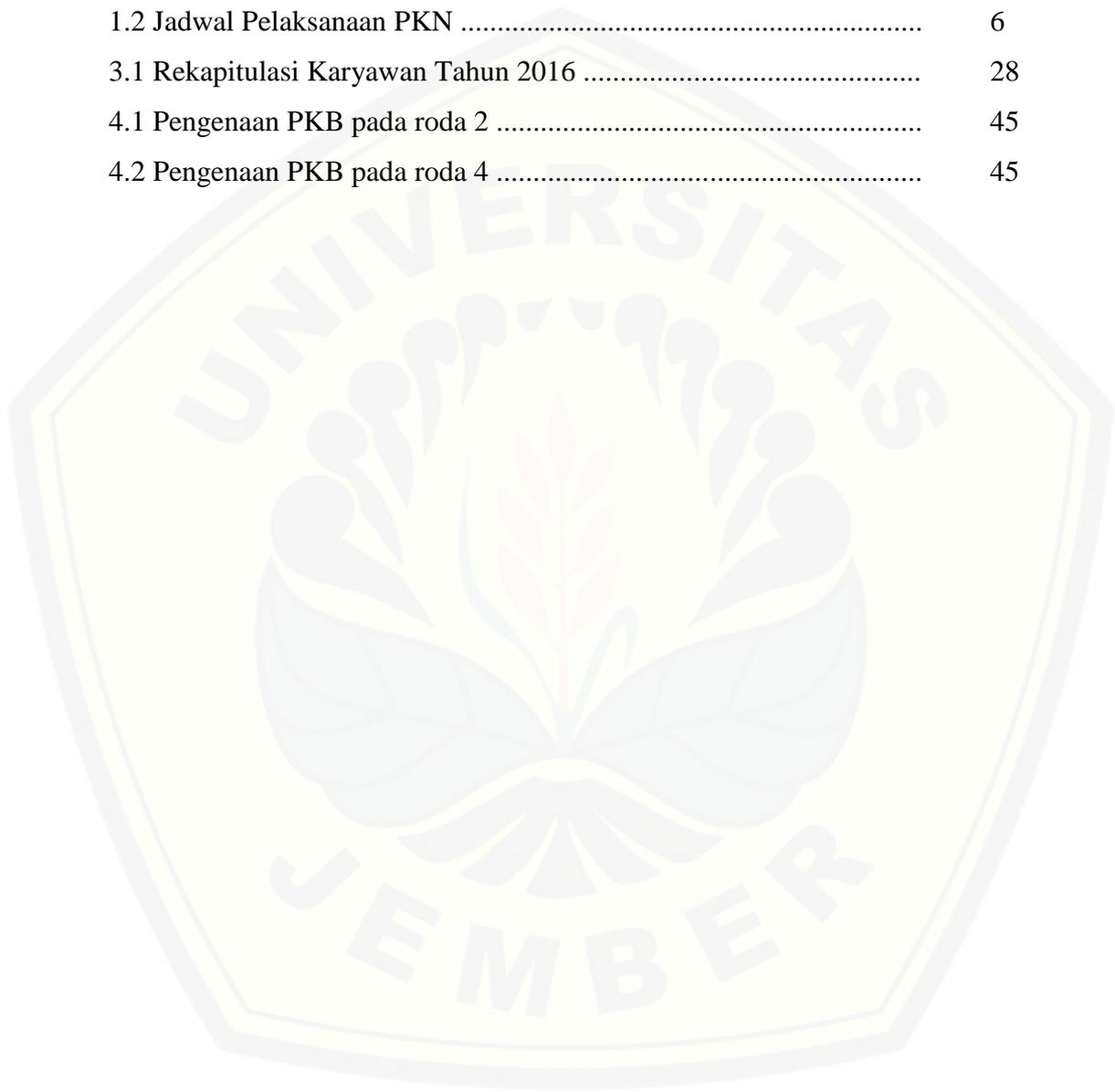
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	14
2.2.4 Asas Pemungutan Pajak .....	15
2.2.5 Cara Pemungutan Pajak .....	15
2.2.6 Pembagian Pajak .....	16
2.3 Pajak Daerah .....	17
2.3.1 Dasar Hukum .....	17
2.3.2 Pengertian Pajak Daerah .....	17
2.3.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Daerah .....	18
2.4 Pajak Kendaraan Bermotor .....	19
2.4.1 Wajib, Subjek, dan Objek PKB .....	19
2.4.2 Dasar Hukum dan Pelaksanaan PKB .....	20
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>21</b>
3.1 Sejarah UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jatim Kabupaten Bondowoso .....	21
3.2 Struktur Organisasi .....	22
3.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Bagian ...	21
3.2.1.1 Kepala UPT. Dinas Pendapata .....	23
3.2.1.2 Sub Bagian Tata Usaha .....	24
3.2.1.3 Seksi Pendataan dan Penetapan .....	24
3.2.1.4 Seksi Pembayaran dan Penagihan .....	24
3.2.2 Personalia .....	25
3.3 Kegiatan Pokok UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jatim Kabupaten Bondowoso .....	27
3.4 Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 (milik pribadi, umum, dan dinas Pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jatim Kabupaten Bondowoso.....	28
<b>BAB IV. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>30</b>
4.1 Pelaksanaan Administrasi PKB Pada KB. SAMSAT Kabupaten Bondowoso .....	32
4.2 Pelaksanaan Administrasi PKB Pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jatim Kabupaten Bondowoso .....	41

4.2.1 Pendaftaran dan Pendataan .....	41
4.2.2 Penetapan atau Pengenaan .....	43
4.2.3 Pembayaran dan Pelunasan .....	45
4.2.4 Penagihan dan Dinas Luar .....	47
4.3 Prosedur Hasil Kegiatan Pelaksanaan Administrasi PKB pada KB. SAMSAT untuk diteruskan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jatim Kabupaten Bondowoso .....	49
BAB V. KESIMPULAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	57



**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan .....	3
1.2 Jadwal Pelaksanaan PKN .....	6
3.1 Rekapitulasi Karyawan Tahun 2016 .....	28
4.1 Pengenaan PKB pada roda 2 .....	45
4.2 Pengenaan PKB pada roda 4 .....	45



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi .....	23
4.1 <i>Flowchart</i> pelaksanaan administrasi PKB Kabupaten Bondowoso ..	31
4.2 <i>Flowchart</i> pelayanan pendaftaran dan penetapan pada KB. SAMSAT..	34
4.3 Lanjutan <i>Flowchart</i> Pendaftaran dan Penetapan pada KB. SAMSAT ...	36
4.4 Lanjutan <i>Flowchart</i> Pendaftaran dan Penetapan pada KB. SAMSAT dan <i>Flowchart</i> Pelayanan Loker 2 Pembayaran dan Penyerahan .....	38
4.5 Lanjutan <i>Flowchart</i> Pelayanan Pembayaran dan Penyerahan .....	39
4.6 Alur Pendaftaran dan Pendataan PKB .....	42
4.7 Alur Penetapan atau Pengenaan PKB .....	43
4.8 Alur Pembayaran dan Pelunasan PKB .....	46
4.9 Alur Penagihan dan Dinas Luar .....	49
5.0 <i>Flowchart</i> Prosedur Hasil Pelaksanaan Administrasi PKB pada KB. SAMSAT untuk diteruskan kepada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jatim Kabupaten Bondowoso .....	51
5.1 Lanjutan <i>Flowchart</i> Prosedur Hasil Pelaksanaan Administrasi PKB pada KB. SAMSAT untuk diteruskan kepada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jatim Kabupaten Bondowoso .....	52

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Surat Permohonan Ijin Tempat PKN
Lampiran 2	Surat Balasan Tempat PKN
Lampiran 3	Daftar Absensi Peserta PKN
Lampiran 4	Surat Permohonan Nilai PKN
Lampiran 5	Daftar Nilai Hasil PKN
Lampiran 6	Formulir SPPKB
Lampiran 7	KTP
Lampiran 8	STNK
Lampiran 9	BPKB
Lampiran 10	Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB
Lampiran 11	Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lampiran 12	Surat Tagihan Pajak Daerah
Lampiran 13	Surat Peringatan 1
Lampiran 14	Surat Peringatan 2
Lampiran 15	Surat Paksa
Lampiran 16	Tanda Bukti Penerimaan BPn-2
Lampiran 17	Lanjutan Tanda Bukti Penerimaan BPn-2
Lampiran 18	Lanjutan Tanda Bukti Penerimaan BPn-2
Lampiran 19	Lanjutan Tanda Bukti Penerimaan BPn-2
Lampiran 20	Surat Tanda Setoran BPn-3
Lampiran 21	Slip Setoran Bank Jatim
Lampiran 22	Kartu Konsultasi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Alasan Pemilihan Judul**

Indonesia merupakan suatu negara yang menjadikan pajak sebagai salah satu dari pendapatan negara. Pajak merupakan penerimaan terbesar di Indonesia sehingga diperlukan peran serta masyarakat sebagai wajib pajak baik secara aktif maupun pasif sehingga dapat meningkatkan besarnya penerimaan pajak terhadap negara. Sehubungan dengan besarnya peranan pajak terhadap penerimaan negara, maka pemerintah terus berupaya meningkatkan perolehan pajak melalui berbagai jenis pajak yang dipungut.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang No. 28 Tahun 2009) Pajak sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya Otonomi Daerah maka pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi yang ada di daerahnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan daerah yang menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah. Berdasarkan pasal 2 Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 jenis Pajak Provinsi dan 11 jenis Pajak Daerah.

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang perorangan atau badan.

Menurut Mardiasmo (2011:13) Pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran., Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Jawa Timur khususnya Kabupaten Bondowoso, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan Pajak untuk daerah provinsi. Di Indonesia pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan oleh daerah.

Kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta peran masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah yang

diatur dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso salah satunya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang dari Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahunnya mampu menyumbangkan dana yang begitu besar bagi daerah. Berikut ini daftar target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso dari tahun 2014 – bulan Februari 2016.

Tabel 1.1 UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso  
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan  
(Tahun Anggaran 2014, 2015, dan sampai bulan Februari 2016)

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE	KET.
		Rp	Rp	Rp	
1	2014	30.502.801.000	33.475.900.297	109,75%	
2	2015	35.072.951.000	37.905.058.253	108,07%	
3	2016	6.144.210.167	5.870.343.900	15,92%	Realisasi hingga bulan Feb-16

Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Kabupaten Bondowoso, 2016

Dari data tersebut terlihat jumlah pendapatan pertahunnya di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2014 dan 2015 target yang telah ditetapkan mampu terealisasi bahkan sedikit lebih banyak jumlah realisasi dibandingkan target yang ditentukan. Namun pada tahun 2016 sudah mampu memberikan pemasukan untuk Dinas Pendapatan Provinsi Kabupaten Bondowoso meskipun belum sesuai dengan target karena pendapatannya masih sampai bulan Februari.

Hal yang menarik, di Kabupaten Bondowoso, Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi terbesar yaitu dengan pencapaian prosentase 75% dari keseluruhan pajak Kabupaten Bondowoso. Tentunya, potensi angka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor khususnya di Bondowoso akan terus berkembang bersamaan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan kepemilikan kendaraan

bermotor. Maka potensi besar tersebut, tidak dapat dilewatkan begitu saja; perlu penanganan yang serius dan optimal.

Dari data tersebut, terdapat beragam kendala serta hambatan yang menyertai proses pemungutan pajak, diantaranya: keterlambatan, penundaan, terlebih keengganan dalam membayar pajak. Maka Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pemungutan pajak, dalam menyikapi hal tersebut, Dinas Pendapatan Daerah telah memiliki mekanisme penagihan untuk kelancaran pembayaran PKB. Pajak kendaraan bermotor yang dipungut memerlukan prosedur administrasi yang baik, efektif dan efisien guna mengetahui kondisi keuangan yang ada dan pengawasan terhadap penerimaan dan penggunaan sumber dana pemerintah daerah yang akan diarahkan pada tujuan kepentingan masyarakat daerah. Maka, pelaksanaan administrasi tentunya memiliki peranan penting dalam pencapaian target penerimaan pajak khususnya di sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan yang telah dipaparkan diatas, maka terlihat pentingnya pembahasan tentang Pelaksanaan Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor yang diadakan di UPT.Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso serta bagaimana upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yang diaplikasikan pada program-programnya. Oleh karena itulah, maka laporan praktek kerja nyata (PKN) ini mengambil judul: **“PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT.DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR KABUPATEN BONDOWOSO”**.

## **1.2. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Praktek kerja Nyata ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung tentang pelaksanaan administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT.Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso,

- b. Untuk membantu pelaksanaan administrasi pajak kendaraan bermotor pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso.

#### 1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Beberapa kegunaan yang diperoleh dalam melaksanakan praktek kerja nyata, meliputi:

- a. Sebagai salah satu syarat kelulusan akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan,
- b. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan pengalaman praktis/kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso.

### 1.3. Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

#### 1.3.1. Obyek Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso Jl. Achmad Yani 86, Bondowoso, Jawa Timur.

#### 1.3.2. Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sesuai dengan ketentuan Fakultas Ekonomi Universitas Jember; dilaksanakan selama kurang lebih 144 jam terhitung pada 22 Februari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016. Adapun waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang berlaku sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso yaitu: Senin-Kamis pukul 07.00-14.00 WIB dan Jum'at pukul 06.00-11.00 WIB.

### 1.4. Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama Praktek Kerja Nyata di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.

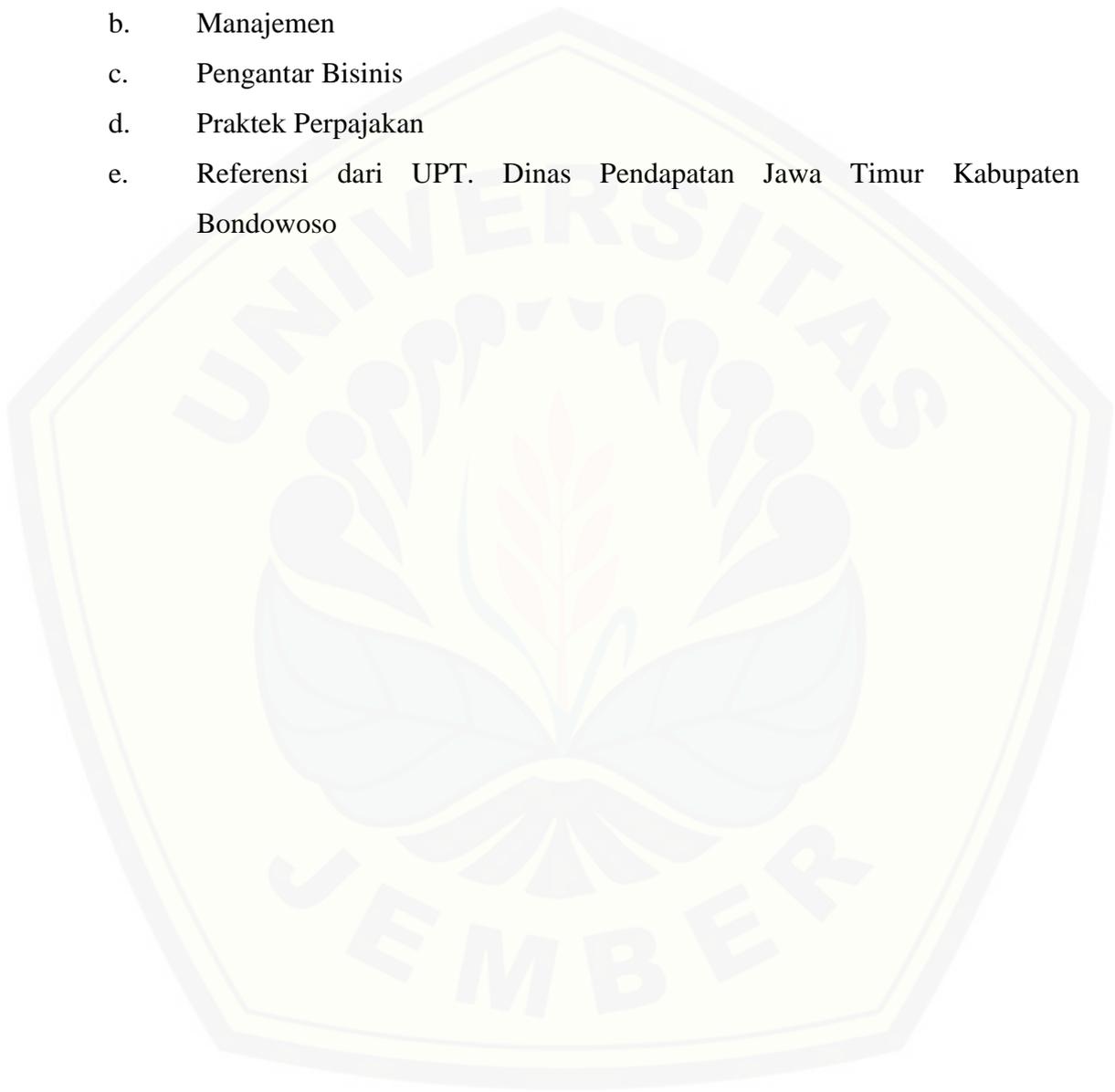
Tabel 1.2 UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso  
Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

No	Kegiatan	Minggu ke			
		1	2	3	4
1.	Perkenalan dengan pimpinan dan Staf serta Pengarahan dari pimpinan UPT.Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso	X			
2.	Menerima penjelasan tentang gambaran umum perusahaan.	X			
3.	Membantu Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor, Membantu Bagian Pelayanan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Membantu Bagian Pelayanan Pembayaran dan Penyerahan.	X	X	X	X
4.	Membantu Monitoring/perekaman surat tagihan pajak daerah (STPD), surat ketetapan pajak daerah, sp1, dan sp2 sesuai status surat dan nomor kohirnya.	X	X	X	X
5.	Membantu Melaksanakan kegiatan dinas luar dengan kegiatan mengantarkan surat tagihan pajak daerah, ketetapan pajak daerah, sp1 dan sp2 di daerah Wonosari, Tapen, Sempol, dan Grujugan		X	X	X
6	Mengumpulkan data untuk penyusunan laporan	X	X	X	X
7	Konsultasi laporan praktek kerja nyata		X	X	X

### 1.5. Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata

Ada pun bidang ilmu yang menjadi dasar atau pedoman dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan penyusunan laporan adalah sebagai berikut:

- a. Perpajakan
- b. Manajemen
- c. Pengantar Bisnis
- d. Praktek Perpajakan
- e. Referensi dari UPT. Dinas Pendapatan Jawa Timur Kabupaten Bondowoso



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Administrasi

#### 2.1.1. Pengertian administrasi

Kata administrasi berasal dari baasa Latin, yaitu *Ad* dan *Ministrare*. *Ad* artinya intensif dan *Ministrare* artinya melayani, membantu, atau memenuhi. Dalam bahasa Inggris, administrasi disebut “*administration*” yang berarti tata usaha. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan; kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; kegiatan kantor dan tata usaha.

Dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tata usaha. Sedangkan dalam arti luas, administrasi adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam strktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa pengertian administrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut The Liang Gie dalam bukunya *Administrasi Perkantoran Modern*, administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung 8 unsur administrasi yaitu:

- a. **Pengorganisasian**  
Pengorganisasian merupakan rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- b. **Manajemen**  
Manajemen merupakan rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerja sama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai.
- c. **Tata Hubungan**  
Tata hubungan merupakan rangkaian perbuatan menyampaikan berita dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerja sama.
- d. **Kepegawaian**  
Kepegawaian merupakan rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerja sama.
- e. **Keuangan**  
Keuangan merupakan rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerja sama.
- f. **Perbekalan**  
Perbekalan merupakan rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerja sama.
- g. **Tata Usaha**  
Tata Usaha merupakan rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerja sama.
- h. **Perwakilan**  
Perwakilan merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerja sama yang dilakukan.

### 2.1.2. Fungsi Administrasi

Menurut Hendri Fayol dalam buku Mulyani Endang ada 5 fungsi administrasi, yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu cara yang dianggap paling berharga bagi perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan secara garis besar menggambarkan tentang apa, bagaimana, mengapa, dan kapan suatu kegiatan akan dilakukan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas serta wewenang dan tanggung jawab sehingga tercipta sebuah organisasi yang dapat digerakkan dalam satu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi pengorganisasian sangat tepat setelah perencanaan karena rencana tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada yang menjalankannya, untuk itu perlu sebuah organisasi yang menjalankan bagian rencana tersebut.

c. Penggerakan

Penggerakan dapat diartikan sebagai keseluruhan usaha, cara teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis. Penggerakan mempunyai fungsi yang teramat penting karena secara langsung berkaitan dengan manusia dengan segala jenis kepentingan dan kebutuhan.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi yang pokok dari administrasi maka pengawasan merupakan tugas yang mutlak dilakukan untuk semua orang yang menduduki jabatan manajerial dan manajer puncak hingga manajer rendah

secara langsung mengendalikan kegiatan teknis-teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.

e. Penilaian

Disini penilaian berarti pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Fungsi penilaian adalah untuk menentukan jawaban apakah Administrasi mengambil langkah yang berkaitan dengan pengembangan karyawan atau tidak. Jawaban yang ditemukan sangat bermanfaat bagi perumusan kebijaksanaan organisasi dalam peningkatan kemampuan kerja seluruh anggota organisasi yang bersangkutan.

### 2.1.3. Tujuan dan Ciri-ciri Administrasi

a. Tujuan administrasi menurut The Liang Gie ada 3, yaitu :

- 1) Usaha penerbitan alat-alat perlengkapan yang mungkin terjadi.
- 2) Menghimpun suatu ketentuan di dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan usaha dari segi pengorganisasian perusahaan.
- 3) Mendayagunakan alat-alat tersebut sehingga dapat berjalan dengan sempurna dan mencapai tujuan.

b. Ciri-ciri administrasi menurut The Liang Gie ada 4, yaitu :

- 1) Adanya kerjasama dari kelompok tersebut.
- 2) Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang tersiri atas dua orang atau lebih.
- 3) Adanya kegiatan/ proses/ usaha.
- 4) Adanya bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan serta tujuan.

### 2.1.4. Manfaat Administrasi Dalam Perusahaan

Dalam tercapainya tujuan perusahaan, maka perlu diadakan kegiatan administrasi yang baik dari seluruh operasional yang ada baik dalam administrasi di bidang pemasaran, produksi keuangan maupun personalia. Pelaksanaan administrasi dalam perusahaan sangat penting karena perusahaan dapat merencanakan kegiatan usahanya, administrasi juga sangat penting perannya

dalam suatu perusahaan karena semua pembiayaan baik dari segi keuangan maupun dari tata usaha merupakan bagian dari administrasi.

## **2.2. Pajak**

### **2.2.1. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat imbalan kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli yang dikutip oleh Erly Suandy (2011:9) adalah sebagai berikut:

Rochmat Soemitro:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar penegeluaran umum.

Soeparman Soemahamidjaja:

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Erly Suandy (2011:10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

### 2.2.2. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### 2.2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif .
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Contoh : PKB, BBNKB, PAP, PBB.

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemunutan pajak yan memberi wewenan, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-ciri *Self Assessment* adalah sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh : PPH, PPN, PPNbm, PBBKB, Pajak Rokok

### c. Sistem *With Holding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *With Holding* adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### 2.2.4. Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

#### a. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atas diperoleh yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

#### b. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

#### c. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

### 2.2.5. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut:

#### a. Stelsel nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni

setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan *rill* diketahui.

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

#### 2.2.6. Pembagian Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membayar rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

## 2.3. Pajak Daerah

### 2.3.1. Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi.

### 2.3.2. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

### 2.3.3. Wajib,Subjek,dan Objek Pajak Daerah

Wajib pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang,termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

Objek pajak daerah adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan utang pajak. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009.Objek pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yang terdiri dari beberapa jenis pajak,yaitu:

- a. Pajak propinsi,terdiri atas:
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
  - 2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - 4) Pajak Air Permukaan
  - 5) Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/Kota,terdiri atas:
  - 1) Pajak Hotel
  - 2) Pajak Restoran
  - 3) Pajak Reklame
  - 4) Pajak Hiburan
  - 5) Pajak Penerangan Jalan

- 6) Pajak mineral bukan logam atau batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak air tanah
- 9) Pajak sarang burung walet
- 10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

#### **2.4. Pajak Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No.13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut oleh daerah atas kepemilikan dan/atau penguasa kendaraan bermotor. Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa termasuk leasing.

Termasuk penyerahan kendaraan bermotor, adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :

- a. Untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan.
- b. Untuk diperdagangkan.
- c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah Indonesia.
- d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

##### **2.4.1. Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Wajib pajak kendaraan bermotor adalah badan atau orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor, apabila wajib pajak berupa badan, maka kewajiban pajaknya diwakili oleh kuasa hukum atau pengurus badan tertentu.

Subjek pajak kendaraan bermotor menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1 adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Objek pajak kendaraan bermotor menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 pasal 3 ayat 1 tentang objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan menurut Undang-undang No.22 Tahun 2009 pasal 71 ayat 1 adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor luar daerah yang berada di daerah lebih dari 90 hari berturut-turut.

#### 2.4.2. Dasar Hukum Pemungutan dan Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

##### a. Dasar Hukum Pemungutan

- 1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

##### b. Dasar Hukum Pelaksanaan

- 1) Peraturan daerah propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang pajak kendaraan bermotor.
- 2) Keputusan gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- 3) Keputusan kepala dinas pendapatan propinsi Jawa timur nomor 70 tahun 2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

##### **3.1. Sejarah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Tugas UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso melaksanakan pemungutan Pajak meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Adapun fungsi UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso adalah: Pelaksana kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Pelaksana Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat, Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan, Pelaksanaan pelayanan masyarakat, dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso adalah :

##### **a. Visi**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso menetapkan Visi sebagai berikut “Terdepan Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Dan Dibanggakan Dalam Pelayanan Publik”

#### b. Misi

Berdasarkan rumusan Visi tersebut Dinas Pendapatan merumuskan dan menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang baik, terpercaya dan transparan.
3. Mewujudkan integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten bertempat di Kabupaten Bondowoso tepatnya di Jalan. A. Yani No.84 Bondowoso. Dan berdirinya pada tanggal 01 Oktober 1962.

### 3.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan.

Tugas utama dari pengorganisasian adalah untuk mempermudah pembagian dan pelaksanaan tugas tiap-tiap bagian yang saling berhubungan baik secara langsung ataupun tidak langsung guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Struktur organisasi dibuat untuk mengurangi atau menghindarkan dari kekacauan dan pertentangan-pertentangan dalam struktur pekerjaan.

Struktur Organisasi harus memungkinkan adanya suatu koordinasi usaha diantara semua satuan dan jenjang sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Struktur organisasi yang digunakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso adalah struktur organisasi garis dan staf (lihat Gambar 3.1)



Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso

### 3.2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Bagian :

#### 3.2.1.1. Kepala UPT. Dinas Pendapatan

Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memantau perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian/Seksi, Adpel, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu, Kasir Penerimaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta mekanisme yang ditetapkan.
- b. Bertanggung jawab terhadap penerimaan sampai dengan penyetoran pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan secara jelas dan dilaksanakan dengan berpedoman Program Kerja Dinas.

- d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pemungutan dan penyetoran pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah serta pelayanan pada masyarakat.
- e. Menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas UPT setiap triwulan dan semester kepada Dinas.

#### 3.2.1.2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.

#### 3.2.1.3. Seksi Pendataan dan Penetapan

Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendataan dan penetapan obyek dan subjek pajak daerah di wilayah kerja.
- b. Menyiapkan surat pemberitahuan (SPT) pajak daerah.
- c. Melaksanakan penetapan pajak.
- d. Menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
- e. Merencanakan penerimaan pajak.
- f. Melaksanakan pengurangan, penghapusan dan pembatalan penetapan pajak.
- g. Menerima dan menindaklanjuti kelengkapan administrasi mutasi objek pajak.
- h. Laporan data objek dan penetapan pajak daerah.

#### 3.2.1.4. Seksi Pembayaran dan Penagihan

Seksi Pembayaran dan Penagihan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Meneliti dan menghimpun tindasan ukti pembayaran dari bendahara penerima pembantu dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setoran.
- b. Menerima dan menghimpun tindasan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan.
- c. Melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan pengaduan masyarakat.
- d. Menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke Dinas melalui Sub Bagian Tata Usaha.
- e. Menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan pajak daerah.
- f. Menerima, membukukan dan menindaklanjuti surat tegoran, surat ketetapan pajak daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional.

### 3.2.2. Personalia

Jumlah pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso yang mendukung pelaksanaan tugas sebanyak 32 pegawai dengan rincian sebagai berikut (Lihat Tabel 3.1).

Tabel 3.1 UPT.Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso Rekapitulasi Karyawan Tahun 2016

No	Uraian	Usia <40 th	41 th – 50 th	Usia >51 th	Jml
a.	Menurut Status				
	- PNSD	2	12	5	19
	- CPNSD	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	2	12	5	19
b.	Menurut Jenis Kelamin				
	- Laki-laki	2	10	4	16
	- Perempuan	-	2	1	3
	<b>Jumlah</b>	2	12	5	19
c.	Pangkat dan Gol/Ruang				
	- Pembina Tk.I-IV/b	-	-	-	-
	- Pembina IV/a	-	-	2	2
	- Penata Tk.I-III/d	-	1	1	2
	- Penata III/c	-	-	-	0
	- Penata Muda Tk.I-III/b	1	-	2	3
	- Penata Muda III/a	1	-	-	1
	- Pengatur Tk.I-II/d	-	2	-	2
	- Pengatur II/c	-	2	-	2
	- Pengatur Muda Tk.I-II/b	-	5	-	5
	- Pengatur Muda II/a	-	2	-	2
	- Juru Tk.I-I/d	-	-	-	0
	- Juru I/c	-	-	-	0
	- Juru Muda Tk.I-I/b	-	-	-	0
	- Juru Muda I/a	-	-	-	0
	<b>Jumlah</b>	2	12	5	19
d.	Menurut Pendidikan				
	- Pasca Sarjana	-	-	2	2
	- Sarjana	1	2	3	6
	- Sarjana Muda/Akademi	-	-	-	0
	- SLTA	2	8	-	10
	- SLTP	1	-	-	1
- SD	-	-	-	0	
	<b>Jumlah</b>	4	10	5	19
e.	Pegawai yang ditempatkan				
	- UPTD	-	9	5	14
	- KB. Samsat	2	3	0	5
	<b>Jumlah</b>	2	12	5	19
f.	Tenaga Kontrak				
	- Honorer	-	-	0	0
	- Pegawai Tidak Tetap	12	1	0	13
	<b>Jumlah</b>	12	1	0	13

Sumber : UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso

### **3.3. Kegiatan Pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso.**

#### **a. Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Disamping itu juga Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam rangka pemungutan Pendapatan Daerah yang berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan pendapatan lain-lain.

#### **b. Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Untuk menjalankan kegiatan operasional, pelayanan dan koordinasi dalam rangka Pemungutan Pendapatan Daerah. UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksana kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Pelaksana Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat.
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat.
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.
- 6) Pelaksanaan pelayanan Masyarakat
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **3.4. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 ( milik pribadi, umum, dan dinas ) Pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso**

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kendaraan bermotor dapat dibagi menjadi 2 yaitu kendaraan bermotor roda 2 dan kendaraan bermotor roda 4. Kendaraan bermotor roda 2 juga dapat dibedakan berdasarkan warna TNKB/plat nomor yaitu hitam dan merah. Sedangkan kendaraan bermotor roda 4 juga dapat dibedakan berdasarkan warna TNKB/plat nomor yaitu hitam, merah, dan kuning. Arti dari setiap warna TNKB/plat nomor adalah :

- a. Plat hitam dengan tulisan berwarna putih

Kendaraan bermotor perseorangan dan sewa. Seperti yang kita pakai sehari-hari di kendaraan kita.

- b. Plat kuning dengan tulisan berwarna putih

Kendaraan bermotor umum seperti bus, truck, angkutan dalam kota (mikrolet dan sejenisnya).

- c. Plat merah dengan tulisan berwarna putih

Kendaraan bermotor milik pemerintah.

Tarif pajak yang dikenakan pada setiap kendaraan bermotor berdasarkan warna TNKB/plat nomor juga berbeda yaitu :

- a. 1,5% untuk kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi
- b. 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
- c. 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial, dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan pemerintah daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No.13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut oleh daerah atas kepemilikan dan/atau penguasa kendaraan bermotor..

Administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT dengan hanya menggunakan dua loket yaitu pendaftaran dan pendataan serta pembayaran dan penyerahan. Di bagian pendaftaran dan pendataan wajib pajak mengisi surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor berupa data pemilik atau data kendaraan secara jelas yang kemudian data tersebut di *entry* ke dalam komputer. Sedangkan dibagian pembayaran dan penyerahan, wajib pajak memberikan data yang telah diisi untuk ditentukan tarif pajak kendaraan tersebut, yang selanjutnya wajib pajak membayar pajak sesuai tarif yang telah ditentukan dan wajib pajak akan menerima Bukti Pembayaran Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Bukti pemabayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat di lampiran 10.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata dalam bidang Administrasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pelaksanaan administrasi pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso dengan melalui tahap yaitu :
  - 1) Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran
  - 2) Pelaksanaan Penetapan
  - 3) Pelaksanaan Pembayaran dan Pelunasan
  - 4) Pelaksanaan Penagihan dan Dinas Luar

Namun untuk mempermudah masyarakat dalam memabayar pajak dan menghemat waktu pelayanan, KB. SAMSAT hanya menyediakan 2 loket pelayanan yaitu :

- 1) Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan
  - 2) Pelayanan Pembayaran dan Penyerahan.
- b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya membantu pelaksanaan administrasi pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
  - 1) Membantu bagian pendataan dan pendafrtran PKB
  - 2) Membantu bagian penetapan PKB
  - 3) Membantu bagian pelayanan dan penyerahan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Baridwan.2006.*Sistem Informasi Manajemen*.Jakarta : Bumi Aksara
- Endang R,Mulyani,dkk.2010.*Modul Memahami Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran*.Jakarta:Erlangga.
- Gie,The Liang.1995.*Administrasi Keuangan Modern*.Jakarta.Liberty
- Mardiasmo.2011.*Perpajakan Edisi refisi*.Yogyakarta.Andi
- Suandy,Erly.2011.*Perencanaan Pajak Edisi 5*.Jakarta.Salemba empat
- Waluyo.2011.*Perpajakan Indonesia edisi 10*.Jakarta.Salemba empat
- ,2014.*Profil UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso*
- ,2015.*Petunjuk Operasional Pelaksanaan Tugas*
- ,2012.*Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.*
- ,2012.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi 3*.Jember.Universitas Jember
- ,2001.*Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.*
- ,2009.*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi Undang-undang.*
- ,2000.*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.*

- 2008.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2001.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2001.Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
- 2001.Keputusan gubernur jawa timur Nomor 53 Tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi jawa timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2007.Keputusan Kepala Dinas pendapatan provinsi Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Lampiran 1



**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150  
Email : [fe@unej.ac.id](mailto:fe@unej.ac.id) Jember 68121 – Jawa Timur

Nomor : 7335/UN.25.1.4/PM/2015  
Lampiran : Satu Bendel  
Hal : **Permohonan Tempat PKN**

11 Desember 2015

Yth. Kepala UPT Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso  
Jl. Achmad Yani No. 86  
Bondowoso

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NAMA	NIM	PROG. STUDI
Desy Priyantini Izzaty	130803102009	D3 - Adm. Keuangan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 01 Februari - 11 Maret 2016

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si  
NIP. 19661020 199002 2 001

Tembusan kepada Yth :

- 1) Yang bersangkutan;
2. Arsip

Lampiran 2



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN  
BONDOWOSO**

Jl. Achmad Yani No. 86 Telpn (0332) 421171 Fax. (0332) 421171 Bondowoso

Bondowoso, 6 Januari 2016

Kepada

Nomor : 423.4 /28/120.373/2016

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi

Sifat : Biasa

Universitas Jember

Lampiran : -

up. Pembantu Dekan I

Perihal : Ijin Praktek Kerja Nyata (PKN)

di

**J E M B E R**

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember Nomor : 7335/UN.25.1.4/PM/2015 tanggal 11 Desember 2015 dan Nomor : 7722/UN.25.1.4/PM/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal : Permohonan Tempat PKN, kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

No.	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1	Desy Priyantini Izzaty	130803102009	D3 – Adm. Keuangan
2	Mareta Utami Kholidah	130803102048	D3 – Adm. Keuangan

Diberikan ijin untuk meksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2016 s.d 31 Maret 2016 dengan ketentuan dilarang menyebarluaskan semua informasi yang diperoleh kepada pihak lain, selain untuk kepentingan akademis yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR  
BONDOWOSO

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



**KERU KURNIANTO, SH**

Penata Tingkat I

NIP. 19711001 199803 1 006

DAFTAR HADIR PKN DI UPT. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR ( BONDOWOSO )  
 MAHASISWA UNEJ-JEMBER  
 BULAN FEBRUARI-MARET 2016

NO	NAMA	BULAN/TANGGAL																	
		FEBRUARI					MARET												
1	DESY PRIYANTINI IZZATY	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	MARETA UTAMY KHOLIDAH																		

NO	NAMA	BULAN/TANGGAL											
		MARET											
1	DESY PRIYANTINI IZZATY	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	MARETA UTAMY KHOLIDAH												

Bondowoso, 21 Maret 2016

A.n KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR  
 BONDOWOSO  
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

UPT. DINAS PENDAPATAN  
 BONDOWOSO  
 HERU KURNIANTO, SH  
 Kepala Tingkat I  
 NIP. 7110011998031006

## Lampiran 4



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150  
Jember 68121

Nomor : **1156**/UN25.1.4/KR/2016  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Permohonan Nilai PKN**

Yth. Pimpinan  
UPT. DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
BONDOWOSO

Sehubungan telah dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) Mahasiswa Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi Universitas Jember pada institusi Saudara, maka dengan hormat kami mohon penilaian terhadap mahasiswa PKN tersebut sebagaimana form penilaian terlampir. Hasil penilaian tersebut mohon dikirim kembali ke Fakultas Ekonomi Universitas Jember dalam amplop tertutup setelah berakhirnya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.  
NIP 19661020 199002 2 001

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.  
NIP 19661020 199002 2 001

## Lampiran 5



UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150

**NILAI HASIL PRAKTEK NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Kedisiplinan	89	Delapan Puluh Sembilan
2	Ketertiban	91	Sembilan Puluh Satu
3	Prestasi Kerja	88	Delapan Puluh Delapan
4	Kesopanan	91	Sembilan Puluh Satu
5	Tanggung Jawab	90	Sembilan Puluh

**IDENTITAS MAHASISWA :**

Nama : Desy Priyantini Izzaty  
NIM : 130803102009  
Program Studi : Administrasi Keuangan

**IDENTITAS PEMBERIAN NILAI :**

Nama : Heru Kurnianto, SH  
Jabatan : Kepala Subag Tata Usaha  
Institut : UPT. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR BONDOWOSO

An. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR  
BONDOWOSO  
Ka. Sub Bag. Tata Usaha



**HERU KURNIANTO, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19711001 19983 1 006

**PEDOMAN PENILAIAN**

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 - 79	Baik
3.	60 - 69	Cukup Baik
4.	50 - 59	Kurang Baik

Lampiran 6

Dasar Hukum Penerbitan STNK : Pasal 64, 65, 66, 67, 68  
UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR**

Tanda Terima :  
No. Pendaftaran : 1765080  
No. Registrasi : 285611  
Tanda Tangan Petugas  


**FORMULIR PERMOHONAN STNK  
DIISI OLEH PEMOHON**

**I. NOMOR REGISTRASI :**

**II. IDENTITAS KENDARAAN**

1. Merk	: Yamaha	9. Warna Kendaraan	: HITAM
2. Type	: 5TL MIO / ALISS	10. Bahan Bakar	: BENOL
3. Jenis	: SEPEDA MOTOR	11. Warna TNKB	: HITAM
4. Model	: SEPEDA MOTOR	12. Tahun Registrasi	:
5. Th. Pembuatan	: 2008	13. Nomor	:
6. Isi Silinder	: 113		
7. Nomor Rangka/NIK/VIN	: MH35TL0068F9 32929		
8. Nomor Mesin	: 5TL 931 854		

**III. DOKUMEN REGISTRASI PERTAMA**

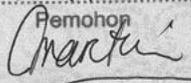
1. No. Faktur	:	7. No. Form A/B/C	:
2. Tanggal	:	8. Kantor Bea dan Cukai	:
3. ATPM / Importir	:	9. Lain-lain	:
4. Nomor PIB	:	- No. Risalah Lelang	:
5. No. Sertifikat Uji Type	:	- No Skep Dump TNI/Polri	:
6. No. TPT	:	- .....	:

**IV. IDENTITAS PEMILIK**

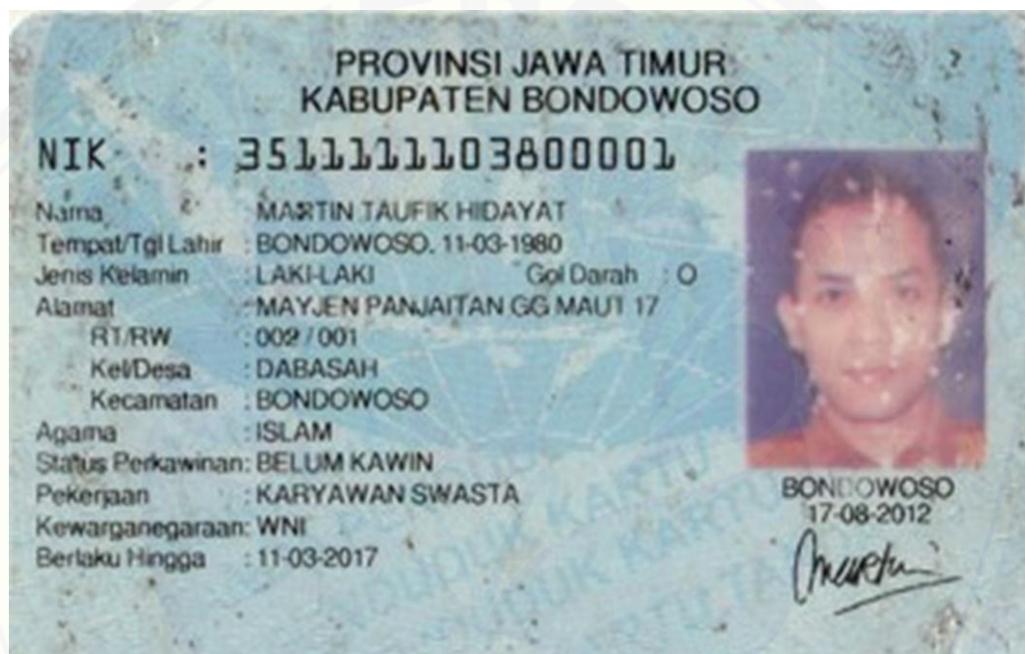
RANMOR MILIK PRIBADI		RANMOR BUKAN MILIK PRIBADI	
1. Nama Lengkap Pemilik	: MARTIN JAUFIK HIDAYAT	1. Nama Badan Hukum	:
2. Alamat Pemilik	: MARTEN PANJAITAN GG MAUT 17 RT/RW 002/001 KEL DABASAH BONDOWOSO.	2. Alamat	:
3. Kode Pos	: 68211	3. Kode Pos	:
4. No. Telp	: 085655 888008	4. No. SIUP	:
5. No. KTP	: 351111103800001	5. NPWP	:
6. NPWP	:	6. No. Akte Pendirian	:
7. No. Passport	:		
8. No. KITAS	:		

**V. JENIS PERMOHONAN**

BARU / PERTAMA	PERUBAHAN	PENDAFTARAN DENGAN PERSYARATAN KHUSUS	PERPANJANGAN
1. CKD 2. CBU 3. Eks Mutasi Luar Daerah 4. Eks Dump TNI/Polri 5. Lelang 6. Lelang Eks Putusan Pengadilan 7. CD/CC/Badan Internasional 8. Eks Angkutan Umum 9. Eks Badan Internasional 10. Eks Taksi 11. Eks Pemerintah 12. Eks CD/CC	1. Nama 2. Alamat 3. Bentuk 4. Mesin 5. Warna 6. No. Registrasi 7. STNK Hilang 8. Hibah / Waris 9. Badan Hukum 10. Mutasi Keluar Daerah	1. STNK Rahasia 2. STNK Khusus - Dinas TNI - Dinas Polri - Sipil	1. Pengesahan STNK 2. Perpanjangan STNK 5th

Surabaya 25 APRIL 2016  
Pemohon  


## Lampiran 7



Lampiran 8

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**D A E R A H**  
**JAWA TIMUR**

**SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR**

No.: **2396347 /JT/**  
**01031 1 21012014**  
**731**      **A**

**NOMOR REGISTRASI** : p 5087 AV  
**NAMA PEMILIK** : TEGUH TRIHADI  
**ALAMAT** : KEL SEKARPUTHI RW 01/01 BWS KEL SEKARPUTHI  
KEC. TEGAL AMPEL BWS

<b>MERK</b>	: YAMAHA	<b>WARNA</b>	: HITAM
<b>TYPE</b>	: 14D AL115C/MIO SOUL	<b>BAHAN BAKAR</b>	: BENSLN
<b>JENIS</b>	: SEPEDA MOTOR	<b>WARNA TNKB</b>	: HITAM
<b>MODEL</b>	: SEPEDA MOTOR	<b>TAHUN REGISTRASI</b>	: 2009
<b>TAHUN PEMBUATAN</b>	: 2009	<b>NOMOR BPRB</b>	: F5752463J
<b>ISI SILINDER</b>	: 00113 CC	<b>KODE LOKASI<sup>1)</sup></b>	: 4974Y464.0973
<b>NOMOR RANGKAIKINVIN</b>	: MH314D0029K289933	<b>NOMOR PENDAFTARAN</b>	
<b>NO. SAR. MESIN</b>	: 14D290192		

**BERLAKU SAMPAI: 28-01-2019**



SURABAYA,  
A.N. KAPOLDA JAWA TIMUR  
DIREKTUR JALU LINTAS



Dn. Ikhsan Hidayat  
KORPRI

POLRI  
28-01-2019

STNK

PENGESEHAAN	

Lampiran 9

I. IDENTITAS KENDARAAN		No. Reg. : BON.0037.187		Model I BPKB		II. IDENTITAS PEMILIK		F. No 5	
1. No. Polisi	P4385 DI	10. No. Rangka/NIK	MH31AD0029K200933	NAMA PEMILIK :	TEGUL TRIHADI				
2. Merk	YAMAHA	11. Nomor Mesin	14D200192	ALAMAT :	SEKAR PUTIH RT 1/1 TEBALAMPEL - BONDOWOSO				
3. Tipe	14 D	12. Jumlah Sumbu	2	PEKERJAAN :	TNI.				
4. Model	SP MOTOR	13. Jumlah Roda	2						
5. Tahun Pembuatan	2009	14. Bahan Bakar	BENKIN						
6. Tahun Perakitan	2009	15. No. Sertifikat Uji Type							
7. Silinder	13	16. No. Uji Berkala							
8. Warna	HITAM								
Tanda Tangan Pemilik Pertama				Dikeluarkan di BONDOWOSO					
				20 JAN 2009					
				POLRES POLUSIAN RESOR BONDOWOSO					
				Drs. DADAN WISHNU WARDANA					
				AJUN KOMISARIS BESAR POLSI KR.68110217					
				Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Kendaraan I	
				1. Sedan	1. Bus	1. Pick Up	<input checked="" type="checkbox"/> Spd Motor Solo	1. Mobil Pemada	
				2. St. Wagon	2. Micro Bus	2. Delver Van	2. Spd Motor dgn Kereta Samping	2. Mobil Ambul	
				3. Mini Bus	3. Bus Bertingkat	3. Truk	3. Scooter	3. Mobil Jenaza	
				4. Jeep	4. Lain-lain	4. Tangki	4. Trail	4. Fork Lift	
				5. Lain-lain		5. Double Cabin	5. Lain-lain	5. Lain-lain	
						6. Lain-lain			

III. KETERANGAN PABEAN/ASAL-USUL		IV. B.P.K.B. YANG PERTAMA		F. No 5	
				(Bila pernah memiliki B.P.K.B.)	
1. Nomor		1. Nomor dan huruf B.P.K.B.			
2. Tanggal		2. Tanggal B.P.K.B.			
3. Pelabuhan		3. Nomor Register B.P.K.B.			
4. Cara Impor		4. Tempat dikeluarkan B.P.K.B.			
5. Nomor Faktur	12627/MS/EXP01-0120	5. Nama/Alamat Pemilik			
6. Nomor C.K.D.		6. Sebab-sebab tidak berlaku B.P.K.B. Pertama			
7. Ket. Lain-lain	FTPT YAMAHA IND MOTOR MFB. JKT, 22 JAN 09				
Penjelasan Cara Impor :					
C.K.D. = Complete Knock Down					
S.K.D. = Semi Knock Down					
B.U. = Built Up					
= Form, A/B/C. Invoeras, PIB, Faktur dan lain-lain.					

Lampiran 10

**BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ**

No: **10579513**

SAMSAT PROVINSI  
JAWA TIMUR

NO. REGISTRASI: P. 2054 BA  
 NAMA PEMILIK: YIVI TRIANAH  
 ALAMAT: S. PARMAN GG. PRAJURIT NO.09  
 RW05/30 BWS / KEL. BADEAN

MERKE/TYPE: HONDA/NF 125TR  
 JENS: BAHAN BAKAR BENZIN  
 MODEL: SEPEDA MOTOR  
 TAHUN/CC: 2009/125  
 WARNA KB: HITAM  
 NO. RANGKAI/NK: MH1JB91159K729116  
 NO. MESIN: JB91E1726733  
 TEL. FAKS/KWT: 12 06 2009

BERLAKU SAMPAI: 22-06-2016

Peringatan: Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

NO. SKUM	POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	BSN KB
000000/0/0000/0000	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
NO. KBLIR: 019986/PL/0731/2015	196.500	XXXXXX	196.500	PKB
	35.000	XXXXXX	35.000	SWDKLLJ
	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	BIAYA ADM. STNK
	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	BIAYA ADM. TNKB
	331.500	0	231.500	JUMLAH

DITETAPAN TGL: 22-06-2015  
 PETUGAS PENETAPAN: KUSNADI. S. SOS

NO. RANGKAI/NK: 105706220615730105  
 NO. MESIN: 9862015NR13611251.500

KEPEMILIKAN: TRIYA SUBAKTI, S

NO. OK: 731/PR/FR

  
 H. ARMANDA, SE, MM  
 NIP. 196302271



Lampiran 12



## SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH ( S T P D )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS PENDAPATAN**  
2896/731/2016

Nomor : 970 /

Kepada.  
Yth. Bpk / Ibu / Sdr. **BUDIANTO**  
**A YANI GG PRINTIS**  
DESA/KEL : KEL BADEAN RW/RT :  
01/02  
KECAMATAN : BONDOWOSO UPTD.

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD :

Tanggal 19-03-2016 , ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas

Kendaraan Bermotor P 1560 DC JENIS : S E D A N  
Nomor Polisi/Registrasi 5849/2016 MERK/TYPE : HONDA ACCORD SE3 GM  
Nomor Kohir 000000/0/0000/0000 THBUAT/CC : 1988  
Nomor Skum :

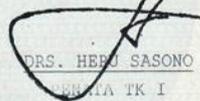
Jenis Pungutan	Pokok	(Sanksi Adm (2%) Perbulan)	Jumlah
PKB	660.000,00	0,00	660.000,00
BBNKB			13.200,00
Jumlah			673.200,00
Jumlah yang harus dibayar *) 2016			

NO. KOHIR TH KOHIR PKBPOKOK PKBDENDU BONDOWOSO, 19-04-2016

Jatuh Tempo Pembayaran : 660.000 0 0  
0 0 0  
0 0 0  
0 0 0

Tempat Pembayaran :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

  
DRS. HERRY SASONO  
PEMUDA TK I  
NIP. 19610308 198210 1 001

\*) Sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak  
\*) Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB.  
\*) Apabila pajak telah dilunasi, Surat ini mohon diabaikan terima kasih

---

**TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN**  
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH  
( S T P D )

<p>Nomor Polisi / Registrasi 2896/731/2016 TGL. MASA PAJAK : 18-03-2017 Nama 19-04-2016 TGL. PENETAPAN : 19-03-2016 Alamat BUDIANTO No. Kohir / Skum A YANI GG PRINTIS Tanggal Penerbitan P 1560 DC Nomor Tel Rumah/HP/Kantor 5849/2016 660.000,00</p>	<p style="text-align: center;"><b>STATUS KENDARAAN</b></p> <p><input type="checkbox"/> LAPOR JUAL <input type="checkbox"/> RUSAK <input type="checkbox"/> HILANG <input type="checkbox"/> KECELAKAAN LAKA <input type="checkbox"/> ALAMAT TIDAK JELAS <input type="checkbox"/> PINDAH ALAMAT <input type="checkbox"/> DIMILIKI <input type="checkbox"/> .....</p>
--	---

NO. TELP/HP : (0332) /  
WAJIB PAJAK / KUASA

NO. KOHIR	TH KOHIR	PKBPOKOK	PKBDENDU	PETUGAS DINAS LUAR
5849	2016	660.000	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	

( ..... ) ( ..... )

\*) Beri Tanda Silang.

## Lampiran 13



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
UPTD. BONDOWOSO**

JL. A. YANI 84 BONDOWOSOBONDOWOSO      TELP. 421171

Nomor : 970 / 2790/731/2016      Kepada :

Sifat : Penting      Yth. Bpk / Ibu / Sdr.

Lampiran : --      PANCORO HARI HANDOKO

Perihal : **Surat Peringatan 1 (SP1)**      SALIWIRYO PRANOWO 22

DESA/KELURAHAN :KEL KOTA KULON RW/RT : 03/1

KECAMATAN :BONDOWOSO

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah ( STPD ) tanggal 04-04-2016

Nomor 970/2414/731/2016 ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas kendaraan bermotor Nomor Polisi/Registrasi P 1803 CZ , dengan perincian pajak terutang pada SKPD.

Nomor Kohir : 32490/2015

Nomor Skum : 000000/0000

Merk / Type : TOYOTA / KIJANG KF40 STD / WARNA : ABU ABU METALIK

Jenis : STATION WGN

Tahun / CC : 1991 / 1486

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB	615.000	12.300	627.300
BBNKB	0	0	0
Jumlah	615.000	12.300	627.300
Jumlah yang harus dibayar *)			627.300

10-05-2016

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal .....  
pada Kantor Bersama SAMSAT. UPTD. BONDOWOSO AHMAD YANI 86 BONDOWOSO

MERK /TYPE : TOYOTA / KIJANG KF40 STD      BONDOWOSO, 19-04-2016

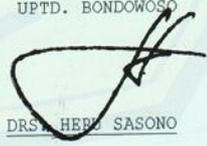
JENIS : STATION WGN      KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

TAHUN : 1991      DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

MASA PAJAK : 02-03-2016      UPTD. BONDOWOSO

TGL.SKPKB : 03-03-2016

NO. TELP/HP : / 087857906487



DRS. HEBU SASONO  
PENATA TK I  
19610308 198210 1 001

\*) Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB

\*) Apabila pajak telah dilunasi. Surat ini mohon diabaikan. terima kasih

## Lampiran 14



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
UPTD. BONDOWOSO**

JL. A. YANI 84 BONDOWOSOBONDOWOSO      TELP. 421171

Nomor : 970 / 2023/731/2016      Kepada .  
Sifat : Penting      Yth. Bpk / Ibu / Sdr.  
Lampiran : --      AMIR RUSLIH  
Perihal : **Surat Peringatan 2 (SP2)**      DS WONOSUKO RW01/03  
      DESA/KELURAHAN : DS WONOSUKO RW/RT : 01/03  
      KECAMATAN : TAMANAN

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah ( STPD ) tanggal 11-03-2016  
Nomor 970/1830/731/2016 dan Surat Peringatan 1 (Pertama) tanggal, 26-03-2016  
Nomor 970/2147/731/2016 ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas kendaraan bermotor Nomor Polisi/Registrasi P 1301 DC, dengan perincian pajak terutang pada SKPD. SKPDKB, SKPDKBT :

Nomor Kohir : 32264/2015  
Nomor Skum :  
Merk / Type : TOYOTA/KJG INNOVA V XS43 DS / WARNA HITAM MTLK  
Jenis : STATION WGN  
Tahun / CC : 2006 / 2494

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB	2.649.000	52.980	2.701.980
BBNKB	0	0	0
Jumlah	2.649.000	52.980	2.701.980
Jumlah yang harus dibayar *)			2.701.980

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal 09-05-2016 pada Kantor Bersama SAMSAT. UPTD. BONDOWOSO AHMAD YANI 86 BONDOWOSO

MERK / TYPE : TOYOTA/KJG INNOVA V XS43      BONDOWOSO, 18-04-2016  
JENIS : STATION WGN  
TAHUN : 2006 / 2494      KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
MASA PAJAK : 06-02-2016      DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR  
TGL. SKPDKB : 09-02-2016      UPTD. BONDOWOSO  
NO. TELP/HP : (0332) / 085250655555

  
**D.S. HERU SASONO**  
 PENATA TK I  
 19610308 198210 1 001

\*) Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB  
\*) Apabila pajak telah dilunasi. Surat ini mohon diabaikan. terima kasih

## Lampiran 15



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS PENDAPATAN**  
 JL.MANYAR KERTOARJO 1 TELP (031) 5947953 FAX. 5941165  
 TROMOL POS 887 SURABAYA 60116

**SURAT PAKSA**  
 NOMOR : 2037/731/201

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**  
**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Jawab : **SALMA**  
 Alamat/Tempat Tinggal : **MAYJEN PANJAITAN RT : 02 RW : 01 KECAMATAN BONDOWOSO**  
 Nomor Registrasi : **P 3110 AS**  
 Jenis/Merek/Type : **SEPEDA MOTOR 54P CAST WHEEL AT**  
 Tahun Pembuatan / CC : **2013 / 113**

Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini

NO	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal SKPD/SKPDKB/SKPKDKBT	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
1	PKB	2015	32090/18-01-2016	162.180,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
Jumlah Rp.				162.180,00

Dengan ini :

- Memerintahkan Penanggung Pajak/Wajib Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kantor Bersama Samsat terdekat, ditambah dengan biaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
- Memerintahkan kepada Jurusita pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak/Wajib Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak di penuhi.

**PERHATIAN**

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI

SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

PASAL 11 AYAT (2) PERATURAN DAERAH PROVINSI

**BONDOWOSO, 18-04-2016**  
 a.n. Kepala Dinas Pendapatan  
 Provinsi Jawa Timur  
 Kepala UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur  
**UPTD BONDOWOSO**  
  
**DRS. HERU SASONO**  
 NIP. 196103081982101001

\*) Coret yang tidak perlu.

## Lampiran 16

KODE KASIR KASDA NO. DOKUMEN : 731 /PR/FR/08  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BPN.2  
 DINAS PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 TANDA BUKTI PENERIMAAN 10

TBP No. : 0000 /PSPKP/SAM/ 2016

Telah Diterima PEMBANTU KASIR PENERIMAAN KB. SAMSAT UPTD. BONDOWOSO

Uang Sebesar : Rp. **4.025.200,00**

(dengan huruf)

EMPAT JUTA DUA PULUHLIMA RIBU DUARATUS RUPIAH

Un: Pembayaran PKB 31-Mar-2016

Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah
1 20 0700 4 1 1 01 01	A-1 PKB SEDAN, JEEP, ST WAGON (Pribadi)	Rp. 555.000
1 20 0700 4 1 1 01 02	A-2 PKB SEDAN, JEEP, ST WAGON (Umum)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 03	A-3 PKB SEDAN, JEEP, ST WAGON (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 04	B-1 PKB BUS, MICRO BUS (Pribadi)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 05	B-2 PKB BUS, MICRO BUS (Umum)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 06	B-3 PKB BUS, MICRO BUS (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 07	C-1 PKB TRUCK, PICK UP (Pribadi)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 08	C-2 PKB TRUCK, PICK UP (Umum)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 09	C-3 PKB TRUCK, PICK UP (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 13	E-1 PKB SEPEDA MOTOR	Rp. 3.440.300
1 20 0700 4 1 1 01 14	E-2 PKB SEPEDA MOTOR (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 15	PKB ALAT BERAT (Pribadi)	Rp. 0
1 2 700 4 1 1 01 16	PKB ALAT BERAT (Umum)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 17	PKB ALAT BERAT (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 4 07 01	Pendapatan Denda PKB	Rp. 29.900
TOTAL		Rp. 4.025.200

Setoran Tunai Rp. 4.025.200

Setoran Warkat Rp. 0

Setoran EDC Rp. 0

TOTAL Rp. 4.025.200

BONDOWOSO , 31-Mar-2016

KASIR PEMBANTU 1301  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR  
 UPTD. BONDOWOSO

KUSNADI,S.SOS.

NIP. 196707181994031006

Penerima

BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR  
 UPTD. BONDOWOSO

SETIYORINI

NIP. 19711029 200801 2 003

Dibuat rangkap 4

Lembar 1 : Kasir Pembantu 1301

Lembar 2 : BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Lampiran 17

KODE KASIR 1201  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 DINAS PENDAPATAN **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**TANDA BUKTI PENERIMAAN**

NO. DOKUMEN: 731 /PR/F/2016.2

TBP No. : 0000 /PSPKP/SAM/ 2016

Telah Diterima **PEMBANTU KASIR PENERIMAAN KB. SAMSAT UPTD. BONDOWOSO**

Uang Sebesar : Rp. **13.764.400,00**

(dengan huruf)

TIGA BELAS JUTA TUJUHRATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS RUPIAH

Un Pembayaran PKB 31-Mar-2016

Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah
1 20 0700 4 1 1 01 01	A-1 PKB SEDAN, JEEP, ST WAGON (Pribadi)	Rp. 1.200.000
1 20 0700 4 1 1 01 02	A-2 PKB SEDAN, JEEP, ST WAGON (Umum)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 03	A-3 PKB SEDAN, JEEP, ST WAGON (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 04	B-1 PKB BUS, MICRO BUS (Pribadi)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 05	B-2 PKB BUS, MICRO BUS (Umum)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 06	B-3 PKB BUS, MICRO BUS (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 07	C-1 PKB TRUCK, PICK UP (Pribadi)	Rp. 6.113.300
1 20 0700 4 1 1 01 08	C-2 PKB TRUCK, PICK UP (Umum)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 09	C-3 PKB TRUCK, PICK UP (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 13	E-1 PKB SEPEDA MOTOR	Rp. 5.613.000
1 20 0700 4 1 1 01 14	E-2 PKB SEPEDA MOTOR (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 15	PKB ALAT BERAT (Pribadi)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 16	PKB ALAT BERAT (Umum)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 17	PKB ALAT BERAT (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 4 07 01	Pendapatan Denda PKB	Rp. 778.100
<b>TOTAL</b>		Rp. 13.764.400

Setoran Tunai Rp. 13.764.400  
 Setoran Warkat Rp. 0  
 Setoran EDC Rp. 0  
**TOTAL** Rp. 13.764.400

BONDOWOSO, 31-Mar-2016  
 KASIR PEMBANTU 1201  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR  
 UPTD. BONDOWOSO

KUSNADI, S.SOS.  
 NIP. 196707181994031006

Penerima  
 BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR  
 UPTD. BONDOWOSO

SETIYORINI  
 NIP. 19711029 200801 2 003

Dibuat rangkap 4

.embar 1 : Kasir Pembantu 1201

.embar 2 : BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU

.embar 3 : SIIR DINAS PEMRIKSIAN PELAPORAN PENDAPATAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 DINAS PENDAPATAN

Lampiran 18

KODE KASIR : 1102  
 Lembar 1 : Kasir Pembantu 1101  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 Lembar 2 : BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU  
 DINAS PENDAPATAN  
 Lembar 3 : SUB-DIS-PENDAPATAN PEMBANTU  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 Lembar 4 : KANTOR KASDA TANDA BUKTI PENERIMAAN  
 NO. DOKUMEN : 731 /PR/FR/03

TBP No. : 0000 /PSPKP/SAMI/ 2016

Telah Diterima PEMBANTU KASIR PENERIMAAN KB. SAMSAT UPTD. BONDOWOSO

Uang Sebesar : Rp. **45.232.775,00**

(dengan huruf)

EMPAT PULUH LIMA JUTA DUARATUS TIGA PULUH DUA RIBU TUJUHRATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH

Unsur Pembayaran PKB 31-Mar-2016

Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah
1 20 0700 4 1 1 01 01	A-1 PKB SEDAN, JEEP, ST WAGON (Pribadi)	Rp. 19.580.125
1 20 0700 4 1 1 01 02	A-2 PKB SEDAN, JEEP, ST WAGON (Umum)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 03	A-3 PKB SEDAN, JEEP, ST WAGON (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 04	B-1 PKB BUS, MICRO BUS (Pribadi)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 05	B-2 PKB BUS, MICRO BUS (Umum)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 06	B-3 PKB BUS, MICRO BUS (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 07	C-1 PKB TRUCK, PICK UP (Pribadi)	Rp. 11.996.800
1 20 0700 4 1 1 01 08	C-2 PKB TRUCK, PICK UP (Umum)	Rp. 1.696.200
1 20 0700 4 1 1 01 09	C-3 PKB TRUCK, PICK UP (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 13	E-1 PKB SEPEDA MOTOR	Rp. 10.821.050
1 20 0700 4 1 1 01 14	E-2 PKB SEPEDA MOTOR (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 15	PKB ALAT BERAT (Pribadi)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 16	PKB ALAT BERAT (Umum)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 17	PKB ALAT BERAT (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 4 07 01	Pendapatan Denda PKB	Rp. 1.138.800
<b>TOTAL</b>		Rp. 45.232.775

Setoran Tunai Rp. 45.232.775  
 Setoran Warkat Rp. 0  
 Setoran EDC Rp. 0  
**TOTAL Rp. 45.232.775**

BONDOWOSO, 31-Mar-2016

KASIR PEMBANTU 1102  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR  
 UPTD. BONDOWOSO

KUSNADI,S.SOS.

NIP. 196707181994031006

Penerima

BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR  
 UPTD. BONDOWOSO

SETIYORINI

NIP. 19711029 200801 2 003

Dibuat rangkap 4

.embar 1 : Kasir Pembantu 1102

.embar 2 : BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Lampiran 19

Lampiran 2 : SPK Pembantu UPT/Dinas  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 DINAS PENDAPATAN  
 KODE KASIR : 1101 BPN.2

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 TANDA BUKTI PENERIMAAN**

TBF No. : 0000 /PSPKP/SAM/ 2016

Telah Diterima *PEMBANTU KASIR PENERIMAAN KB. SAMSAT UPTD. BONDOWOSO*

Uang Sebesar : Rp. **23.371.500,00**

(dengan huruf)

DUAPULUHTIGA JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU LIMA RATUS RUPIAH

Untuk Pembayaran PKB *31-Mar-2016*

Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah
1 20 0700 4 1 1 01 01	A-1 PKB SEDAN, JEEP, ST WAGON (Pribadi)	Rp. 9.744.500
1 20 0700 4 1 1 01 02	A-2 PKB SEDAN, JEEP, ST WAGON (Umum)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 03	A-3 PKB SEDAN, JEEP, ST WAGON (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 04	B-1 PKB BUS, MICRO BUS (Pribadi)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 05	B-2 PKB BUS, MICRO BUS (Umum)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 06	B-3 PKB BUS, MICRO BUS (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 07	C-1 PKB TRUCK, PICK UP (Pribadi)	Rp. 2.724.200
1 20 0700 4 1 1 01 08	C-2 PKB TRUCK, PICK UP (Umum)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 09	C-3 PKB TRUCK, PICK UP (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 13	E-1 PKB SEPEDA MOTOR	Rp. 9.908.300
1 20 0700 4 1 1 01 14	E-2 PKB SEPEDA MOTOR (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 15	PKB ALAT BERAT (Pribadi)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 16	PKB ALAT BERAT (Umum)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 1 01 17	PKB ALAT BERAT (P/TNI/POL)	Rp. 0
1 20 0700 4 1 4 07 01	Pendapatan Denda PKB	Rp. 994.500
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 23.371.500</b>

Setoran Tunai Rp. 23.371.500  
 Setoran Warkat Rp. 0  
 Setoran EDC Rp. 0  
**TOTAL Rp. 23.371.500**

BONDOWOSO 31-Mar-2016

KASIR PEMBANTU 1101  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR  
 UPTD. BONDOWOSO

KUSNADI.S.SOS.  
 NIP. 196707181994031006

Penerima  
 BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR  
 UPTD. BONDOWOSO

SETIYORINI  
 NIP. 1971122200012005  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 DINAS PENDAPATAN

Lampiran 20

2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 DINAS PENDAPATAN      PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 SURAT TANDA SETORAN

STS No. : 073/SPKP.73/2016 BPn-3

Bank : BANK JATIM  
 Alamat Bank : JL BASUKI RAHMAT NO 98-104 SBY  
 No. Rek : 0011000477

Harap Diterima Uang Sebesar : Rp. 89.330.175.00  
 (Dengan Huruf)  
 DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH RIBU SERATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH

Untuk Pembayaran Tanggal : 31/03/2016  
 Penerimaan dari KASIR PENERIMAAN PEMBANTU BONDOWOSO

Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah
1 20 0700 4 1 1 01 01	A-1. SEDAN, JEEP, STATION WAGON ( PRIBADI )	Rp. 32.950.125,00
1 20 0700 4 1 1 01 02	A-2. SEDAN, JEEP, STATION WAGON ( UMUM )	Rp. 0,00
1 20 0700 4 1 1 01 03	A-3. SEDAN, JEEP, ST. WAGON (TNI-POLRI/PMT/PEMBA)	Rp. 0,00
1 20 0700 4 1 1 01 04	B-1. BUS, MICRO BUS ( PRIBADI )	Rp. 0,00
1 20 0700 4 1 1 01 05	B-2. BUS, MICRO BUS ( UMUM )	Rp. 0,00
1 20 0700 4 1 1 01 06	B-3. BUS, MICRO BUS (TNI-POLRI/PEMERINTAH/PEMBA)	Rp. 0,00
1 20 0700 4 1 1 01 07	C-1. TRUCK, PICK UP ( PRIBADI )	Rp. 21.824.700,00
1 20 0700 4 1 1 01 08	C-2. TRUCK, PICK UP ( UMUM )	Rp. 1.696.200,00
1 20 0700 4 1 1 01 09	C-3. TRUCK, PICK UP (TNI-POLRI/PEMERINTAH/PEMBA)	Rp. 0,00
1 20 0700 4 1 1 01 13	E-1. SEPEDA MOTOR	Rp. 32.859.150,00
1 20 0700 4 1 1 01 14	E-2. SEPEDA MOTOR (TNI-POLRI/PEMERINTAH/PEMBA)	Rp. 0,00
1 20 0700 4 1 1 01 15	ALAT BERAT ( PRIBADI )	Rp. 0,00
1 20 0700 4 1 1 01 16	ALAT BERAT ( UMUM )	Rp. 0,00
1 20 0700 4 1 1 01 17	ALAT BERAT (TNI-POLRI/PEMERINTAH/PEMBA)	Rp. 0,00
J U M L A H		Rp. 89.330.175,00

BONDOWOSO, 31/03/2016  
 UNIT PELAKSANA TEKNIK  
 DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR  
 BONDOWOSO  
 PENERIMAAN PEMBANTU      PENERIMA/BANK JATIM

YORINI  
 REGISTRER MD TK.I  
 1029 200801 2 003

  
 31 MAR 2016

Dibuat rangkap 7  
 Lembar 1 : Bidang Akuntansi BPKAD Prov. Jatim  
 Lembar 2-3: Seksi Pembayaran Pelunasan UPTD  
 Lembar 4 : Dipenda Prov. Jatim  
 Lembar 5 : Arsip BPP Dipenda  
 Lembar 6 : Bank

No. Dok. : 731/PP/FR/01  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 DINAS PENDAPATAN

Lampiran 21



**bankjatim**  
bersama kami, berkembang pasti

**BUKTI SETORAN**

Cabang : .....

Jenis Rekening :  Simpeda  Sirkus  Tabungan Haji

Nomor Rekening / Customer : .....

Nama Pemilik Rekening : .....

Berita / Keterangan : .....

Nama Penyeter : .....

Alamat Penyeter : .....

Informasi Penyeter : .....

Nasabah No. Rekening .....  
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal .....

Khusus Setoran > Rp.100.000.000,- (ekuivalen)

Sumber Dana : .....

Tujuan Transaksi : .....

**KETENTUAN**  
 1. Setoran sah setelah di validasi atau di tanda tangan Teller  
 2. Setoran akan di bukukan setelah dana efektif di terima dengan baik  
 3. Bukukan dan pencairan setoran dana Rp.100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotocopy tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah

Tabunganku  Lainnya .....  
 Rupiah  Valas ( ..... )

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Di Isi Oleh Bank : .....

Blaya : .....

Komisi : .....

Jumlah yang dibayar : .....

**TERBILANG** : .....

Tanggal : 31 MAR 2023  
 Teller : .....

Penyeter : .....

Lampiran 22



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
 Jalan Kalimantan 57 - Kampus Bumi Tegal Boto  
 Kotak Pos 125 - Telp. (0331) 337990 - Fac. (0331) 332150 Email :  
 fe@unej.ac.id Jember 68121

---

**KARTU KONSULTASI**  
 BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3  
 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : Desy Priyantini Izzaty  
 NIM : 130803102009  
 Program Studi : Administrasi Keuangan  
 Judul Laporan PKN : PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR KABUPATEN BONDOWOSO

Dosen Pembimbing : Dra. Susanti P., M.Si.  
 TMT. Persetujuan : 19 Februari 2016 s/d 19 Juli 2016  
 Perpanjangan : 19 Juli 2016 s/d 19 September 2016

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.		Konsultasi proposal	1.
2.		Revisi sesuai saran	2.
3.	7/4-2016	Revisi	3.
4.		Par 1. Alasan pemilihan judul	4. ....
5.		III. 3.2. 73.3, 234	5. ....
6.	14/4-2016	Revisi: alasan pemilihan judul, bab III & bab IV sesuai saran, daftar pustaka	6.
7.			7. ....
8.			8. ....
9.	19/4-2016	Revisi bab IV. hasil kary PKN	9.
10.	25/4-2016	4.1 Rantai 4.2 UPT BONDOWOSO	10.
11.			11. ....
12.	9/5-2016	Ace Par I & Bab V Ace Signadisa & Signi	12.
13.			13. ....
14.			14. ....
15.			15. ....

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi  
  
 Dra. Susanti Prasetyaningtyas, M.Si.  
 NIP. 19660918 199203 2 006

Jember.....  
 Dosen Pembimbing  
  
 Dra. Susanti P., M.Si.  
 NIP. 19660918 199203 2 002